



**PERATURAN DAERAH**

## Pembahasan 7 Raperda Tahun Ini Dibatalkan

UMBULHARJO—Target program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2018 Kota Jogja dikurangi. Dari total 31 produk hukum yang dipatok, Dewan merevisi jadi 24 raperda.

Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan pengurangan target tersebut berdasarkan hasil konsultasi dan efektivitas waktu. Wallhasil, pembahasan tujuh raperda terpaksa ditunda pembahasannya tahun ini. "Waktu efektif tinggal empat bulan lagi sehingga baik eksekutif maupun legislatif menyepakati pengurangan tujuh raperda pada Propemperda 2018," kata dia kepada wartawan, Selasa (7/8).

Ketujuh Tujuh raperda yang ditunda itu terdiri dari lima raperda inisiatif dari eksekutif dan dua raperda inisiatif dari legislatif. Lima raperda inisiatif eksekutif masing-masing meliputi Raperda terkait dengan Pengendalian Minuman Beralkohol; Raperda Perubahan Pajak Daerah; Raperda Sertifikasi Kesehatan; Raperda Penyelenggaraan Pemakaman; dan Raperda Pengawasan Kualitas Air Minum.

Adapun dua raperda inisiatif legislatif yang pembahasannya ditunda tahun ini meliputi Raperda Kemitraan Ekonomi Kerakyatan, dan Raperda Pengelolaan Perpustakaan. Dewan, kata Bambang, menyadari sisa waktu hingga akhir tahun tidak akan cukup menyelesaikan 31 produk hukum. "Apalagi masih ada sekitar lima raperda yang harus dibahas dari awal, ujar dia.

Selain itu ada empat raperda yang pembahasannya masih berhenti di tengah jalan. Salah satunya adalah terkait dengan penyelenggaraan parkir yang merupakan raperda limphan dari pembahasan pada 2017. Akibat belum selesainya pembahasan raperda itu, raperda lainnya, seperti misalnya raperda terkait dengan retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir juga tersendat.

"Kami akan berkoordinasi dengan panitia khusus. Akan kami tagih komitmen mereka untuk menyelesaikan pembahasan raperda. Seharusnya kalau ada masalah teknis dikonsultasikan kepada kami," kata Bambang.

Ketua DPRD Jogja Sulanarko mengungkapkan, tahun politik menjadi tantangan bagi anggota Dewan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. "Terutama bagi anggota yang kembali mencalonkan diri," Mereka harus bisa membagi waktu antara tugas di Dewan dengan konstituennya. Kami akan meminta kepada seluruh pimpinan fraksi untuk menyepakati batas waktu pembahasan Raperda yang tersisa," ujar Koko, sapaan akrab dia. (Abdul Hamid Razak)

**REGULASI YANG DITUNDA PEMBAHASANNYA TAHUN INI**

**RAPERDA INISIATIF EKSEKUTIF**

- 1 Raperda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.
- 2 Raperda tentang Perubahan Pajak Daerah.
- 3 Raperda tentang Sertifikasi Kesehatan.
- 4 Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- 5 Raperda tentang Pengawasan Kualitas Air Minum.

**RAPERDA INISIATIF LEGISLATIF**

- 1 Raperda tentang kemitraan ekonomi kerakyatan.
- 2 Raperda pengelolaan perpustakaan.

Sumber: *Wawancara* (hari)

| Nilai Berita                               | Sifat                                     | Tindak Lanjut                                       |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Negatif           | <input type="checkbox"/> Amat Segera      | <input type="checkbox"/> Untuk Ditangga             |
| <input type="checkbox"/> Positif           | <input type="checkbox"/> Segera           | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netral | <input checked="" type="checkbox"/> Biasa | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers                 |

**- Bag. Hukum**

Yogyakarta, .....  
 Pjt. Kepala Sekretaris  
 Ttd  
**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005